



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 01 November 2018

Halaman: 13

Instansi

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

**PEMILU 2019**

## Takmir Sepakat Tolak Politik Masuk Masjid

JOGJA—Seluruh takmir masjid di Jogja sepakat menolak masuknya kepentingan politik praktis dan pragmatis menjelang Pemilu 2019. Mereka sepakat masjid tetap akan digunakan sebagai pusat pengembangan peradaban Islam.

Kepala Bidang Humas Hukum dan Wakil Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jogja Aminuddin mengatakan masjid harus jadi pionir perdamaian. Terlebih saat ini isu-isu keagamaan tersebar secara masif di media sosial.

"Masjid harus tetap dijadikan sarana pemberdayaan umat. Jangan dijadikan tempat untuk politik praktis. Jangan itu hanya akan memecah belah umat," katanya sesuai forum group discussion (FGD) bertajuk *Meneguhkan Jogja Istimewa dalam Bingkai Ukhuwah Islamiyah dan Wathaniyah* di Kantor Kemenag Jogja, Rabu (31/10).

Kegiatan FGD tersebut diikuti oleh 100 takmir masjid dan penyuluh perwakilan dari 14 kecamatan se-Jogja. Sesuai FGD yang juga menghadirkan Ketua PCNU Jogja, Yazid Alandi dan Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jogja Deeni Astiyanto, para takmir dan penyuluh mengikrarkan *Deklarasi Jogja Damai dari Masjid* yang berisi tiga poin.

Salah satunya, menolak dijadikannya masjid untuk kegiatan yang mengarah pada terorisme, radikalisme, politik praktis dan pragmatis. Para takmir juga berukuh akan menjadi masjid tetap sebagai tempat pengembangan peradaban Islam, pembinaan dan pemersatu umat. "Masjid adalah tempat netral. Kami juga mengimbau agar para takmir masjid untuk seleksi memilih penceramah," kata Amin.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Kemenag Jogja Abdul Suud yang juga didapat sebagai narasumber dalam FGD tersebut mengatakan Kemenag sudah memprediksi isu keagamaan menjadi salah satu isu yang diangkat kontestan Pemilu untuk menggaet pemilih pendulang suara.

• Lebih Lengkap Halaman 16

**Takmir Sepakat...**

"Semua berkepentingan (dengan isu keagamaan), itu sudah nyata dan meluncur deras. Namun kami sudah menginisiasi agar umat jangan terkotak-kotak, terpecah belah hanya beda pilihan politik," kata Suud.

Dia mencontohkan kasus bendera tauhid yang sedang ramai saat ini. Menurutnya, masyarakat harus bisa membedakan antara mana terminologi agama dan juga politik. Kasus tersebut, kata Suud merupakan isu politik yang dibalut agama.

Menurut dia meski muncul kasus-kasus intoleransi di Jogja namun masyarakat di Jogja yang heterogen cukup selektif menerima informasi. Kondisi tersebut turut mampu menjaga kerukunan antarumat beragama.

"Takmir masjid juga selalu diingatkan untuk selektif memilih khatib. Jika dirasa ceramahnya menimbulkan gejolak, kami minta untuk diganti," kata Suud. (Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005